
Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata di Air Ninivala Kabupaten Maluku Tengah

Michelle Aprilia Manuputty¹, Triyuni Soemartono², Harry Nenobais³

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr Moestopo
(Beragama)

E-mail: michelleaprilial818@gmail.com¹, triyunisoemartono28@gmail.com²,
harynenobais@dsn.moestopo.ac.id³

Article History:

Received: 02 Oktober 2025

Revised: 14 November 2025

Accepted: 26 November 2025

Keywords: Policy Evaluation,
Implementation, Tourism.

Abstract: The purpose of this study was to examine the implementation of tourism policy at Air Ninivala in Central Maluku. The theory used in this research is William Dunn theory that is effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The method used in this research is qualitative research with research paradigm used is post-positivism. Location and time of research are in Central Maluku Regency. The subject of this research is the head of tourism department of Central Maluku Regency as well as the staff of the Department of Tourism and society. Data collection techniques are observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal. The results of this study indicate that the effectiveness: Policies are fulfilled so that the effective tourism program is marine ecotourism. Efficiency: The use of financial and human resources has not been done efficiently, adequacy: the evaluation of the policy implementation of tourism in central Maluku Regency in the adequacy dimension is considered to have not met the adequacy. Alignment: Policy distribution has not been maximized., Accuracy: evaluation of the policy implementation of tourism in central Maluku Regency is fulfilled. The suggestion of this study is that the regional government should run the budgeting principles efficiently, transparently, accountable, and on target so as to maintain the efficient use of the budget for the policy of tourism development in Central Maluku Regency in a sustainable manner and so that the elements of efficiency, adequacy, And smoothing can be appropriate and fulfilled optimally should the use of the budget in advance need to conduct an in-depth study with regard to social environmental factors so as not to harm.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penyelenggaraan, Pariwisata.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terhadap Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata di Air Ninivala Kabupaten Maluku Tengah. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori William Dunn yaitu Efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivisme. Tempat dan waktu penelitian yaitu di kabupaten Maluku Tengah. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah maupun staf dinas pariwisata dan masyarakat Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa Efektivitas: kebijakan terpenuhi sehingga Program Pariwisata yang efektif adalah Ekowisata Bahari. Efisiensi: Penggunaan sumber daya baik finansial dan manusia belum dilakukan secara efisien, Kecukupan: Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah dalam dimensi kecukupan dianggap belum memenuhi kecukupan. Perataan: Distribusi kebijakan belum maksimal., Ketepatan: evaluasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata di kabupaten maluku tengah terpenuhi. Saran dari penelitian ini yaitu hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah menjalankan prinsip-prinsip penganggaran secara efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga dapat menjaga efisiensi penggunaan anggaran bagi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah secara berkelanjutan dan Agar unsur efisiensi, kecukupan, dan perataan dapat sesuai dan terpenuhi dengan optimal hendaknya hendaknya penggunaan anggaran terlebih dahulu perlu melakukan kajian secara mendalam dengan memperhatikan faktor lingkungan sosial sehingga tidak merugikan.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, pemerintah secara terus-menerus mengimplementasikan beragam kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah harus didukung oleh masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif, pemerintah harus

berkolaborasi dengan masyarakat dan akademisi untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dan mendorong kemandirian ekonomi di setiap daerah (Mahadiansyar, 2020).

Pemerintah telah memfasilitasi kemandirian ekonomi di setiap daerah melalui berbagai kebijakan, termasuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi melalui program *nawacita* 2014-2019. Sektor-sektor strategis yang diidentifikasi adalah sumber daya ekonomi yang secara substansial mempengaruhi perekonomian daerah, khususnya tiga sektor utama pembangunan yaitu pertanian, pariwisata, dan perikanan. Diantara tiga sektor tersebut pariwisata merupakan *leading sector* pembangunan nasional (Kemenparekraf, 2022).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pariwisata mencakup berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata sangat penting untuk mendorong pemerataan, menciptakan peluang bisnis, dan memberikan manfaat, sehingga mampu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan lokal, nasional, dan global. Kemajuan pariwisata di Indonesia secara substansial memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan devisa dan menciptakan lapangan kerja. Sektor pariwisata diantisipasi akan muncul sebagai “*core economy*” dan penyumbang utama devisa di Indonesia dalam lima tahun ke depan (2020-2025) (Kwelju, 2019).

Pemerintah kini telah mengidentifikasi sektor pariwisata sebagai kontributor utama bagi perekonomian negara, melampaui minyak sawit mentah (CPO) (Sakti 2019). Sejak tahun 2014, sektor pariwisata telah muncul sebagai sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah pajak. Menurut data dari Kementerian Pariwisata, penerimaan devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2015 sebesar US\$ 12,23 miliar atau setara dengan Rp 169 triliun. Jumlah tersebut menduduki peringkat keempat penyumbang devisa terbesar di tahun 2015, setelah minyak dan gas, batu bara, dan kelapa sawit. Pada tahun 2019, penerimaan devisa dari pariwisata mencapai US\$ 19,29 miliar, hampir melampaui target US\$ 20 miliar, dan menjadi penyumbang terbesar, melebihi ekspor kelapa sawit dan migas. Era otonomi saat ini menempatkan pariwisata sebagai sektor fundamental yang dapat meningkatkan kapasitas daerah. Sektor pariwisata merupakan industri yang dominan dan paling kuat dalam mendanai perekonomian pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Supriono, 2017: 98). Dari sudut pandang pengembangan sumber daya manusia, pariwisata berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi penduduk yang berdekatan dengan destinasi pariwisata.

Sektor pariwisata saat ini mulai menjadi salah satu sektor unggulan dalam melakukan pembangunan daerah. Dari upaya pembangunan tersebut, pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan mampu menciptakan berbagai lapangan pekerjaan (Rusyidi, Fedryansah 2018). Pada hakikatnya pariwisata telah memberikan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan suatu daerah, terutama pada pertumbuhan ekonomi, hal tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan pajak serta menghadirkan berbagai lapangan pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, disebutkan bahwa salah satu tujuan pariwisata yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan potensinya pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pariwisata memiliki dampak positif yang pertama adanya pemberdayaan masyarakat, yang kedua terjadinya hubungan baik secara

interpersonal dengan masyarakat lokal, yang ketiga dampak terhadap kelembagaan sosial, yang keempat terbukanya berbagai lapangan pekerjaan, yang kelima dampak terhadap ritme kehidupan masyarakat lokal, dan yang keenam kebudayaan masyarakat lokal semakin eksis di mata wisatawan (Surahman, Sudarta. 2020:77).

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga kerap digambarkan sebagai negara bahari, yang tentunya terlihat dari banyaknya ekosistem pantai dan laut (seperti goa, laguna, pantai berpasir, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, estuaria dan hutan mangrove) yang memiliki keindahan yang masih terjaga keasliannya. Salah satu contoh daerah Provinsi di Indonesia yang sedang giat dalam pengembangan wisata bahari yaitu Provinsi Maluku dengan Kabupaten Maluku Tengah sebagai lokasi yang dikonsentrasikan sebagai tujuan pengembangan objek wisata bahari. Provinsi Maluku berpotensi untuk mampu mengembangkan berbagai objek wisata, baik alam, budaya, sejarah, buatan dan lain-lain. Akan tetapi yang menjadi pengembangan produk yang sangat potensial yaitu, pada pengembangan wisata alam, dengan wisata bahari sebagai unggulannya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pulau-pulau yang ada di Provinsi Maluku maupun sepanjang garis pantai yang dapat dijumpai hampir di setiap bagian wilayah Provinsi Maluku khususnya Kabupaten Maluku Tengah.

Tempat pariwisata di daerah Maluku khususnya Kabupaten Maluku Tengah sangatlah beragam dimulai dari, Pantai Liang, Air Panas Tulehu, Pantai Natsepa, Benteng Duurstede, Benteng Beverwijk, Lubang Buaya Morela, Pulau Tujuh, Ora Beach, Mata Air Ninivala (Kali Jodoh), Banda Neira. Dengan demikian jika di kelola dengan baik, tentunya hal tersebut sangatlah berguna untuk menambah pendapatan bagi masyarakat dan pihak pemerintah yang ada di setiap daerah. Perlu adanya sentuhan dari pengusaha, sebab dengan adanya pengusaha maka industri wisata yang ada pada setiap daerah akan lebih berkembang.

Hal ini diharapkan mampu bekerja dengan baik dan efisien guna menjawab tantangan bagi masyarakat dengan sangat bijak. Sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2021 tentang pedoman kepariwisataan yang diatur pada Bab II Pasal 2 sebagaimana menjelaskan, penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, percaya pada diri sendiri dan perikehidupan dalam keseimbangan, keserasian serta keselarasan (Sahetapy, 2023).

Hal demikian dilakukan dengan prinsip agar tempat wisata mampu memberikan dampak terhadap sektor ekonomi. Provinsi Maluku sebagai Kawasan kepulauan menempati wilayah seluas 721,480 km² dengan sekitar 93% dari seluruh luas wilayah berupa lautan dan hanya sekitar 7% daratan. Dengan demikian, wilayah pesisir Indonesia memiliki arti yang sangat strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya.

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada pasal 3 dan 4 yang menjelaskan terkait visi dan misi dari pada tempat pariwisata. Pada perannya Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah mulai melakukan kerja sama dengan pihak pengelola (Masyarakat lokal/Pemilik Lokasi), dalam usaha agar tempat wisata tersebut lebih berkembang, kerja sama yang dilakoni sesama pihak pemerintah dan pengelola lokal, pihak pengelola mendapatkan 60% dari hasil pendapatan wisata, sedangkan pihak pemerintah mendapatkan 40%, yakni pada tahun 2015-2019 namun kesepakatan itu hanya berjalan selama satu tahun. Pada tahun 2019 pihak pengelola kemudian bekerjasama lagi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yakni Dinas Pariwisata dengan angka pendapatan yang berbeda, yakni pihak pengelola mendapatkan 70%, sedangkan pihak pemerintah mendapatkan

30%. Hal ini karena terjadinya gempa dan covid-19 yang mengakibatkan penurunan angka pengunjung yang berdampak pada pendapatan tempat wisata di Kabupaten Maluku Tengah.

Namun dalam pelaksanaan permasalahan urusan pelaksanaan pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah diidentifikasi pengembangan dan promosi destinasi pariwisata, kuantitas kunjungan wisatawan, kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata, kapasitas manajemen kepariwisataan, pengembangan daya saing industri pariwisata.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2012:20), menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya” dalam arti yang luas. Pengertian yang dikemukakan oleh Eyestone ini mencakup penafsiran yang luas dan ambigu, karena istilah kebijakan publik dapat mencakup banyak aspek.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan melibatkan estimasi atau penilaian terhadap kebijakan, yang meliputi substansi, implementasi, dan dampaknya (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan tidak hanya terjadi pada tahap akhir, tetapi juga pada seluruh proses kebijakan. W. Dunn mengindikasikan bahwa istilah evaluasi mencakup berbagai makna, yang semuanya mengacu pada penerapan skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian, dan perumusan ulang.

Pariwisata

Pariwisata adalah sebuah usaha yang menawarkan fasilitas, infrastruktur, dan berbagai layanan. Efektivitasnya dalam menarik wisatawan bergantung pada karakteristik tertentu, seperti yang dicatat oleh Yoeti, Oka (1999; 57). Elemen-elemen tersebut meliputi atraksi, transportasi, restorasi, akomodasi, konservasi, dan institusi yang mengawasi dan menopang semua komponen pendukung. Semua komponen tersebut dapat menjadi daya tarik wisata.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian serta merupakan lokasi yang menjadi tempat peneliti untuk mengumpulkan data. Maka dari itu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2024 di Kabupaten Maluku Tengah.

Desain Penelitian

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian Kualitatif menurut Catherine Marshal merupakan suatu proses untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada di dalam interaksi manusia. Pemahaman mengandung makna bahwa peneliti dalam meneliti memahami permasalahan yang ada pada konteks masalah. Dalam penelitian kualitatif gejala dalam suatu objek bersifat holistic sehingga di dalam penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitiannya berdasarkan variable penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Melalui metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan suatu gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah dapat diperoleh data-data yang lebih tajam, lengkap dan mendalam.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau tempat sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah maupun staf dinas pariwisata dan masyarakat. Obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk Mengumpulkan informasi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi penelitian merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka lihat dan saksikan selama penelitian. dimaksudkan untuk pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara yang terstruktur . Hal ini dikarenakan penulis ingin mendapatkan jawaban dari apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini penulis akan mendapatkan informasi langsung dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah Yakni sebagai narasumber sehingga dapat menghasilkan jawaban dan data penelitian yang lebih komprehensif.

3. Dokumentasi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk menjadi bukti atau arsip pada saat penulis melakukan penelitian di lokasi penelitian.

4. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Mardiasmo (2017:134) menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi maupun tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dimensi efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcomes*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Sesuai analisis penelitian, pengolahan data dan wawancara dilapangan mengenai evaluasi

kebijakan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah pada dimensi efektivitas, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, Wakil Ketua DPRD Malteng/ Ex Ketua Komisi 4 (Bidang Pariwisata) Malteng, Raja Negeri Piliana dan Ketua POKDARWIS Malteng.

Ripparda menjadi acuan, indikator atau data spesifik yang digunakan lebih didasarkan pada: Potensi daya tarik wisata. Dimana kebijakan-kebijakan ini menggerakkan aktivitas pariwisata di tiap desa wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat setempat dari sektor pariwisata, pelaksanaan festival pariwisata dalam *calendar of event pariwisata*.

Sektor kepariwisataan di Maluku tengah telah berjalan dengan efektif. Program Pariwisata yang efektif adalah Ekowisata Bahari. Maluku Tengah punya banyak destinasi wisata yang perlu dikembangkan kedepannya, wisata Bahari, wisata Sejarah dan wisata Pegunungan, dan kesemuanya menjadi tujuan wisatawan Nasional dan Internasional. Karna Sektor Pariwisata memiliki Dampak Simultan, *Multi Player Effect*, yang berdampak terhadap pendapatan pada sektor lain, diantara Jasa Transportasi, Jasa Perhotelan, Kuliner.

Hal terpenting dari pengembangan sektor pariwisata adalah pihak pemerintah daerah mampu membangun komunikasi yang sinergis antara *stakeholder*, pihak swasta dan masyarakat sebagai pelaku wisata. Terutama Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki adat istiadat, tradisi dan seni budaya berbeda-beda. Apabila perbedaan terus dikembangkan maka akan menambah jumlah lokasi pariwisata yang layak dikunjungi bukan hanya di tempat pariwisata yang sudah dikenal masyarakat luas.

Pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Maluku Tengah meliputi wisata Pantai, Air terjun dan Gunung Binaiya di Desa Piliana dan masih banyak lagi tersebut tidak lepas dari promosi yang terus menerus dilakukan pula oleh masyarakat. Pemerintah Daerah Maluku Tengah memiliki visi dan misi yang sangat bagus untuk mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata Maluku Tengah yang berpengaruh positif bagi pihak swasta maupun pelaku usaha. Keanekaragaman pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah tidak hanya menarik di mata masyarakat lokal saja tetapi juga wisatawan domestik dan mancanegara.

Efisiensi

Setiap kegiatan yang akan atau telah dilakukan dalam mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan diperlukan adanya efisiensi. Sedarmayanti (2014) menjelaskan bahwa efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Hal tersebut mengandung maksud bahwa semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya akan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Sesuai observasi dan wawancara di lapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah pada dimensi efisiensi, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok meliputi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah Dan Kepala Bidang Pariwisata Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah.

Efisiensi yang Penggunaan sumber daya baik finansial dan manusia belum dilakukan secara efisien. Artinya bahwa dari segi finansial sudah dilakukan efisiensi namun kurangnya anggaran menyebabkan kebijakan yang dilaksanakan tidak maksimal sehingga harus dilakukan dengan skala prioritas sesuai daya tarik dengan jumlah kunjungan wisatawan tinggi. Untuk efisiensi anggaran yang perlu dilakukan adalah fleksibilitas pekerjaan dalam melakukan perubahan

anggaran.

Telah dilakukan perencanaan anggaran untuk satu tahun kerja namun dalam perjalanannya terdapat banyak kebijakan yang harus diambil dan mengubah arah perencanaan, baik dari waktu, lokasi hingga jenis pekerjaan. Untuk itu perlu sistem yang lebih fleksibel untuk melakukan penyesuaian tersebut, memang terlihat bahwa dampaknya akan keluar dari jalur perencanaan tapi untuk ketercapaian tujuan organisasi perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lapangan yang penting terukur, efisien dan efektif.

Penggunaan sumber daya cukup efisien, meskipun terdapat beberapa pemborosan pada biaya promosi yang kurang terfokus. Area perbaikan ada pada efisiensi distribusi anggaran. Strategi seperti digitalisasi promosi pariwisata dan pelatihan manajemen sumber daya untuk masyarakat dapat meningkatkan efisiensi.

Hampir semua lokasi pariwisata telah mendapatkan sentuhan renovasi dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Bagi pelaku wisata menanggapi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola dana anggaran daerah untuk pengembangan sektor pariwisata sudah efisien. Demikian juga dengan dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk bersemangat mengembangkan usaha yang dekat dengan lokasi pariwisata. Pada saat ini, wisatawan domestik dan mancanegara lebih cerdas untuk mencari tahu *rating* pariwisata atau aktif bertanya kepada *agent travel* tentang fasilitas yang tersedia di dekat lokasi wisata misal ketersediaan kuliner dan pusat oleh-oleh yang dimana dalam hal ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah kabupaten Maluku Tengah untuk ketersediaan kuliner maupun oleh-oleh ciri khas lokal yang dimana dalam hal ini berkolaborasi dengan masyarakat lokal.

Kecukupan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online menjelaskan pengertian cukup adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan tidak lebih atau kurang. Hal tersebut mengandung maksud bahwa semua kebutuhan baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia apabila terpenuhi maka akan menumbuhkan kepuasan tersendiri.

Sesuai analisis penelitian, pengolahan data dan wawancara dilapangan mengenai Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah pada dimensi kecukupan, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok meliputi Wakil Ketua DPRD Malteng (Ex Komisi 4), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, Raja Negeri Pilliana Kecamatan Tehoru dan POKDARWIS Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah dalam dimensi kecukupan dianggap belum memenuhi kecukupan. Pembangunan di segala bidang pada sektor pariwisata tidak terlaksana sesuai dengan rencana, Akibat tidak adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar dalam merumuskan kebijakan yang mengakibatkan pemasukan daerah melalui sektor pariwisata jauh dari kata cukup dan tidak sesuai dengan target, rencana pembangunan masih tetap berjalan. selain itu, Perhatian pemerintah untuk pengembangan pariwisata Maluku Tengah sangat rendah, sehingga Pemerintah daerah harus melakukan penawaran *Proposal Pjobject* pengembangan pariwisata kepada pemerintah pusat, agar mendapat perhatian yang maksimal.

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah dalam dimensi kecukupan dianggap belum memenuhi kecukupan. Pembenahan infrastruktur baik infrastruktur pariwisata maupun aksesibilitas. adapun rencana tindak lanjut berdasarkan ketidakcukupan Penyelenggaraan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah bisa diatasi dengan

Pengusulan kegiatan ke instansi teknis tertentu, Menganggarkan pengadaan infrastruktur dan pemeliharaan, Pembuatan website atau aplikasi khusus Simfo pariwisata, Melakukan FGD pariwisata dengan semua pemangku kepentingan, usaha pariwisata, maupun komunitas pariwisata lainnya secara regional sesuai kebutuhan yang ada.

Kecamatan Tehoru belum memenuhi unsur cukup dan sesuai dalam upaya pembangunan atau renovasi lokasi pariwisata khususnya yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kegiatan pariwisata khususnya dalam hal infrastruktur namun dalam sumber daya manusia terpenuhi. Kebijakan saat ini belum cukup, terutama dalam aspek pendanaan dan koordinasi antar instansi. Diperlukan kebijakan tambahan untuk mendukung promosi dan pengembangan kapasitas lokal.

Perataan

Kamus Besar Bahasa Indonesia pada www.kbbi.lektur.id menjelaskan bahwa perataan adalah sama rata, penyamaan, penjajaran, penyesuaian, penyetaraan, pelicinan, pelepasan, penghalusan, pamarasan, penarahan, perautan, pengupasan, pengopekan, pengelupasan, egalisasi, penyelesaian, pendataran.

Sesuai analisis penelitian, Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah pada dimensi kecukupan, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok meliputi Wakil Ketua DPRD Malteng (Ex Komisi 4), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, Raja Negeri Pilliana Kecamatan Tehoru dan POKDARWIS Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata pada dimensi perataan tidak sesuai dan belum terpenuhi secara maksimal. Dalam hal ini, pemerataan pembangunan tidak dilaksanakan secara maksimal.

Pemerataan juga bukan hanya mengenai pembangunan sarana prasarana di lokasi pariwisata khususnya yang dikelola oleh pemerintah daerah, namun pemerintah daerah harus memberikan kesempatan kepada pelaku wisata untuk memaksimalkan produksi barang dan jasa, misalnya dengan mengadakan promo paket wisata bahari/pantai agar terjadi pemaksimalan pemerataan secara maksimal.

Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Zeithaml, dkk dalam penelitian Rismawati, dkk (2015) menjelaskan secara rinci dan menyebutkan bahwa responsivitas termasuk ke dalam salah satu dimensi kualitas pelayanan publik, dimana dalam responsivitas sendiri terdiri dari atas beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan Merespon Masyarakat
Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dari itu sebagai petugas layanan harus mengetahui bagaimana agar dapat bersikap dan berkomunikasi dengan baik dan sopan terhadap masyarakat.
2. Kecepatan Melayani
Pelayanan yang cepat dimaksudkan dengan meliputi kesigapan dan ketulusan petugas dalam menjawab pertanyaan atau permintaan dari masyarakat.
3. Ketepatan Melayani
Pelayanan dengan tepat yaitu dalam melayani jangan sampai terjadi kesalahan baik dalam hal

pekerjaan maupun pembicaraan, dalam artian ini pelayanan yang diberikan oleh petugas harus sesuai dengan keinginan masyarakat.

4. Kecermatan Melayani

Kecermatan dalam memberikan pelayanan perlu diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa merugikan masyarakat. Pelayanan dengan cermat yaitu petugas selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam melakukan penyampaian pelayanan serta dalam melayani kebutuhan masyarakat.

5. Ketepatan Waktu Pelayanan

Maksud dari pelayanan dengan waktu yang tepat yaitu petugas dalam melayani masyarakat diharapkan pelaksanaan pelayanannya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

6. Kemampuan Menanggapi Keluhan

Setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik wajib dalam menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan maupun keluhan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dilakukan agar supaya pelanggan dapat memperoleh kepastian waktu pelayanan yang akan diterimanya.

Sesuai analisis penelitian, Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah pada dimensi responsivitas, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok meliputi Wakil Ketua DPRD Malteng (Ex Komisi 4), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, Raja Negeri Pilliana Kecamatan Tehoru dan POKDARWIS Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata di kabupaten maluku tengah pada dimensi responsivitas sesuai dan terpenuhi. Banyaknya pembangunan di sektor kepariwisataan menimbulkan banyak perubahan untuk semua pihak baik pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat lokal di Kabupaten Maluku Tengah.

Pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan jaminan mengenai pengembangan sektor kepariwisataan telah berhasil dilaksanakan Responsivitas ini berbentuk aksi cepat tanggap pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dengan membuka lahan pekerjaan baru di bidang pengelolaan pariwisata.

Proses evaluasi yang dilakukan pemda disesuaikan dengan proses perencanaan-pelaksanaan hingga evaluasi dengan dokumen penganggaran yang ada. Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dibuktikan dengan dokumentasi dan kwitansi belanja untuk pekerjaan tersebut hingga evaluasi lainnya untuk mengukur ketercapaian program atau tidak. Kebijakan pariwisata yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan hal ini diukur dengan sistem perencanaan anggaran yang mengatur terkait sisi biaya, lokasi dan volumenya. Meskipun perencanaan tersebut diatur sebelum tahun berjalan namun terdapat perubahan-perubahan sesuai kebutuhan di lapangan maupun harapan masyarakat.

Ketepatan

Pengertian tepat lebih kearah sesuai dengan harapan atau keinginan yang dikehendaki setiap individu. Sedangkan ketepatan merupakan kemampuan mengarahkan sesuatu dengan sadar kepada objek yang dikehendaki. Poerwadarminto (2013:155) menjelaskan bahwa ketepatan dapat diartikan sebagai ketelitian. Suharno (2014:35) menjelaskan bahwa ketepatan adalah kemampuan untuk mengarahkan sesuatu gerak ke sesuatu sasaran sesuai dengan tujuannya. Ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan dan berhubungan dengan keinginan untuk memberikan arah kepada sasaran dengan maksud serta

tujuan tertentu.

Sesuai analisis penelitian, Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah pada dimensi ketepatan, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok meliputi Wakil Ketua DPRD Malteng (Ex Komisi 4), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, Raja Negeri Pilliana Kecamatan Tehoru dan POKDARWIS Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah sudah tepat sasaran ke semua aspek kehidupan masyarakat lokal. Untuk itu Pemerintah Daerah terus melakukan pengkajian secara rutin, mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan. Termasuk kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Olehnya itu, dalam menetapkan kebijakan, harus dikaji dengan baik, melibatkan semua pihak, agar prodak kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan secara terus menerus.

Pengembangan sektor kepariwisataan sudah tepat sasaran. Pemerintah Daerah melalui RIPPARDA yang dituangkan dalam rencana jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan yang dilakukan. Apakah program yang dijalankan tersebut sesuai dan tepat sasaran atau tidak. Jika belum sesuai akan dilakukan perubahan dalam rencana kerja. Untuk memastikan kebijakan pariwisata jangka panjang indikator pengukur melalui RKP yang tetap bersumber dari RIPPARDA sebagai Rencana Induk pembangunan pariwisata kabupaten. Strategi dan program yang telah dirumuskan perlu dianalisa pelaksanaannya dalam rencana kerja yang ada.

Pembahasan

Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan dimensi efektivitas terhadap evaluasi penyelenggaraan kebijakan pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa setiap kebijakan-kebijakan pariwisata yang direncanakan dan terukur tetap RIPARDA menjadi acuan untuk setiap pengambilan kebijakan. Teori Dunn (2003:429) menyatakan bahwa Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu *alternative* mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah memberikan suatu indikator dan spesifikasi yang disesuaikan dengan potensi daya tarik wisata dimana hal ini terletak pada kondisi geografis, kunjungan wisatawan, tematik dan potensi pariwisata setiap wilayah.

Mahmudi (2005:92) menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Maka hasil dari penerapan RIPARDA maka hasil positif yang didapat yaitu penetapan desa wisata dimana hal ini menimbulkan hasil (*output*) positif yaitu menggerakkan aktivitas pariwisata di tiap desa wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat setempat dari sektor pariwisata, pelaksanaan festival pariwisata dalam *calendar of event* pariwisata setiap tahun, promosi pariwisata melalui media sosial, cetak dan elektronik, pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif. kebijakan-kebijakan ini menggerakkan aktivitas

pariwisata di tiap desa wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat setempat dari sektor pariwisata.

Menurut Prihartono (2012:37), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Dalam program pariwisata kabupaten Maluku Tengah, Program pariwisata dalam bidang wisata bahari dan juga wisata alam menjadi *Multiplayer Effect* yang berdampak terhadap pendapatan pada sektor lain, diantara Jasa Transportasi, Jasa Perhotelan, dan juga Kuliner yang tentunya memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Menurut Teori Katz dan Kahn (dalam Steers 1958:8) efektivitas sebagai usaha mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara, di sini ada dua faktor yang dianggap paling penting dalam penentuan efektivitas dalam hal ini di Kabupaten Maluku Tengah sepanjang tahun 2023 ada dua wisata bahari yang menyumbangkan PAD ke Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Pantai Natsepa & Pantai Kuako.

Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa responden terkait evaluasi penyelenggaraan kebijakan penyelenggaraan pariwisata kabupaten maluku tengah maka dalam dimensi efesiensi menurut Teori Dunn Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai namun dalam penelitian yang dilakukan pada dimensi efesiensi evaluasi penyelenggaraan kebijakan penyelenggaraan pariwisata kabupaten maluku tengah belum terpenuhi sebab Penggunaan sumber daya baik finansial dan manusia belum dilakukan secara efisien. Salah satu faktor kurang nya efesiensi dalam penyelenggaraan pariwisata kabupaten maluku tengah ialah tidak maksimalnya skala prioritas sesuai daya tarik dengan jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi, yang tentunya hal ini dimulai dari proses perencanaan yang terukur sehingga setiap kebijakan yang dijalankan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Menurut Dunn, jika sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa pemborosan dalam alokasi anggaran promosi yang kurang tepat sasaran, Biaya yang dikeluarkan belum sepenuhnya sebanding karena ada pengeluaran yang kurang efektif sehingga prosesnya implementasi kebijakan terhambat dan tidak berjalan secara efisien.

Kecukupan

Menurut Winarno (2002: 186) kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Maka berdasarkan hal ini, evaluasi penyelenggaraan kebijakan pariwisata kabupaten maluku tengah pada dimensi kecukupan belum terpenuhi, sebab dalam pengelolaan infrastruktur yang menjadi sarana/prasarana dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada khususnya di Desa Ninivala Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah didapati kekurangan fasilitas dan

sangat minim jauh dari dimensi kecukupan.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. Infrastruktur pendukung, dari segi transportasi, akomodasi dan fasilitas umum masih sangat kurang dan belum memenuhi standar karena kebutuhan untuk sektor pariwisata menjadi sebuah sistem untuk mengukur ketersediaan dan mobilisasi wisatawan dari dan ke lokasi pariwisata, untuk infrastruktur pendukung pariwisata seperti transportasi, akomodasi dan fasilitas umum lainnya belum sesuai dengan ekspektasi.

Infrastruktur yang mendukung hanya cukup pada daerah-daerah yang lebih dulu dikenal dan banyak dipromosikan seperti seperti Banda Neira, Seram Utara Barat (Saleman) dan Sawai di Seram Utara. Titik-titik tersebut menjadi pusat akomodasi terbanyak meskipun di tiap kecamatan terdapat sarana akomodasi.

Perataan

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap dimensi perataan menurut Teori Dunn, (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajiban. Dalam Evaluasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata kabupaten maluku tengah didapati bahwa distribusi kebijakan belum secara maksimal sebab banyak potensi di daerah wisata yang terpencil namun tidak dilakukannya pengembangan pariwisata secara optimal hal ini menimbulkan perataan yang tidak terpenuhi untuk itu perlu pemerintah daerah harus bekerja sama dengan masyarakat lokal yang memiliki daerah potensi pariwisata untuk bersama mengembangkan destinasi pariwisata sehingga dimensi perataan terpenuhi.

Menurut Winarno (2002: 188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh

kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih.

Responsivitas

Bentuk responsivitas yang diteliti oleh peneliti dalam Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah dimana dalam teori Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan dalam hal ini untuk memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu pemerintah Kabupaten Maluku tengah memiliki bentuk responsivitas yang terpenuhi dimana terdapat website maltengkab.go.id atau spam.lapor ada juga melalui media sosial milik dinas yaitu [disparpora malteng](https://www.instagram.com/disparpora_malteng) dan [@pesonamalukutengah](https://www.instagram.com/pesonamalukutengah).

Hal ini merupakan suatu bentuk responsivitas pemerintah daerah kabupaten maluku tengah dalam memberikan pelayanan suatu kebijakan dan wadah terhadap segala bentuk masukan maupun kritik demi kepentingan pariwisata di Kabupaten Maluku tengah. Menurut Winarno (2002: 189) responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Selain itu untuk memenuhi unsur responsivitas maka pemerintah daerah maluku tengah juga melakukan FGD (*Forum Discussion Group*) dengan semua pemangku kepentingan baik masyarakat, komunitas, pelaku pariwisata lainnya, usaha-usaha pariwisata, pokdarwis, dll untuk mendiskusikan kebijakan yang akan dilakukan maupun menjangkau aspirasi masyarakat untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan pariwisata. Selain FGD dilakukan tersendiri, bisa juga dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata saat sesi diskusi.

Ketepatan

Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Maka dalam Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah pada dimensi ketepatan pada unsur sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah sudah tepat sasaran ke semua aspek kehidupan masyarakat lokal.

Hal ini juga didukung dengan dalam melahirkan program, kebijakan dan peraturan daerah tentang pariwisata pemerintah daerah kabupaten maluku tengah selalu melibatkan akademisi untuk berkolaborasi dalam membuat suatu kebijakan pariwisata. Studi atau riset yang dilakukan untuk penetapan kebijakan dalam penentuan langkah-langkah yaitu melalui dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh akademisi melalui riset akan dipakai sebagai acuan program yang akan dikembangkan selama 5 tahun maupun dalam program jangka panjang. Hal ini menjadi serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan *grand theory* yang dikembangkan oleh William Dunn tentang evaluasi kebijakan meliputi efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Pada keenam dimensi tersebut terdapat tiga dimensi yang sudah sesuai dan terpenuhi meliputi efektivitas, responsivitas dan ketepatan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah yaitu Kurangnya pengembangan infrastruktur, alokasi anggaran daerah yang minim, Kekurangan sumber daya manusia dan juga distribusi kebijakan belum maksimal terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah.
3. Upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah yaitu semua pihak dalam hal ini Pemerintah daerah dan masyarakat local harus bersama dan merumuskan program kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia untuk pengembangan pariwisata di maluku Tengah. Melakukan studi banding di antar kabupaten maupun kota yang sukses dalam pengembangan pariwisata, dan kesadaran pariwisata semakin meningkat.

REFERENSI

Buku

- A.G. Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Rahman Dilapangan dan Margareth I.R. Rantung. 2022. *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Deepublish, Sleman.
- Abdul Wahab. Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Abi, Hamid. Mustafa dkk. 2021. *Pengelolaan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Abidin, S. Z. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Ali, Faried. 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Argyo Damartoto, 2019. *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Aslinda & Ibrahim, M. Akmal. 2018. *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. Yogyakarta: K- Media.
- Damanik, Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia (Antara Peluang dan Tantangan)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Edi Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siyoto, S., & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Subarsono, A. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV. Alfabeta
- Swarbrooke. 1996. *Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Triyono, S. Joko. 2019. *Evaluasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Buku Seri.
- Yoeti, O. A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Pradnya Paramita.
- Jurnal:**
- A.K. Henaulu, B. Syarifudin, and I. K. Gunarta, Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Kepulauan Menggunakan Sistem Dinamika dengan Mempertimbangkan Dampak Sosial Ekonomi, *Semin, Mas. Manaj. Teknol.* XXIV.pp.1-8.2016.
- Achmad, F., & Supriono, Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Pembelian Ulang (Studi pada Konsumen Go-Ride di Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JB)* Vol. 50 No. 2 September 2017, 135-141.
- Affrian, Reno. 2020. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* "Model – Model Evaluasi Kebijakan Publik."
- Hajaroh, M. 2019. Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *FOUDASUA*, 9 (1)
- Kwelju, J. (2019). Peran Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Daya Saing Pariwisata di Kota Ambon . *Jurnal Badati* 1, 55-71.
- Mahadiansyar, d. (2020). *Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia* .
- Mardiah dan Syarifudin. 2019. *Model-Model Evaluasi Pendidikan*, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 2 No. 1
- Pajriah, S. Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamin, 2018. *VOL. 5 No.1-29*.
- Permatasari, I.A. 2020. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish : Social Government*, 1 (1). 33-37.
- Ridha, N.A., Saggaf, S., & Syamsir, Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Wajo, 2020. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 1 (1), 1-18.
- Rimadevi, G., Mindarti, L.I., & Hanafi, I. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Pantai Ngliyep Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang), 2022. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8 (2), 184-192.

-
- Rosadi, S..& Medayanti, M. Strategi City Branding oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Peningkatan Daya Tarik Pariwisata. Jurnal Wedana. 2019. VOL V No. 2,16-20. Sahubawa, A., Antariksa, & F. Usman.
- Sahetapy, P. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Memajukan Objek Pariwisata di Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah . *Jurnal Administrasi Publik Vol.1 No.1* .
- Tuasikal, Strategi Pengembangan Ekowisata Pantai Nitanghahai di Desa, Morela, Kabupaten Maluku Tengah, J. Angrohut, Vo. 11, No. 1., pp 33-42, 2020.
- T.R. Yusnikusuma and E. Sulistyawati, Evaluasi Pengelolaan Ekowisata di Kawasan Ekowisata Tangkahan Taman Nasional Guning Leuser Sumatera Utara, J. Perenc. Wil. dan Kota, Vol 27, No.3, p.173, 2016, doi: 10.5614/jrcp.2016.27.31